

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Revolusi Industri 4.0 sudah menjadi keniscayaan didalam kehidupan kita sehari-hari dengan telah ter-digitalisasi dan ter-otomatisasi. Menurut Tjandrawniata (2016), salah satu karakteristik unik dari Revolusi Industri 4.0 adalah pengaplikasian kecerdasan buatan atau *artificial intelligence*. Berbagai macam aspek seperti Pendidikan, Kesehatan, maupun Ekonomi juga tak luput dari arus perkembangan zaman. Dalam pendidikan presiden menekankan kepada civitas akademika untuk berinovasi baik didalam perubahan kurikulum, perubahan program studi, maupun perubahan karakter dosen guna menghadapi era disrupsi ekonomi digital 4.0.

Pemerintah Republik Indonesia sendiri di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga begitu vokal dalam menggaungkan penerapan ekonomi digital ataupun revolusi industri 4.0. Berbagai fasilitas penunjang pun telah dan sedang dipersiapkan oleh pemerintah guna memudahkan aplikasi dari revolusi indutsri 4.0 tersebut. Seperti ditulis oleh Muhammad Idris dalam laman berita kompas.com tanggal 24 Maret 2021 yang bertajuk "*Pemerintah Jamin Penyiapan Fasilitas Ekonomi Digital di Indonesia*".

Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan penyiapan berbagai fasilitas penunjang itu berupa infrastruktur 4G serta penyediaan kabel fiber optik. Selain itu

menurut Airlangga, pemerintah juga sedang mendorong satelit multifungsi dikarenakan beberapa daerah di Indonesia misalnya di wilayah timur, lebih efektif dan efisien jika menggunakan satelit. Ia memastikan penyiapan layanan ekonomi digital di Indonesia ini penting mengingat sektor informasi dan komunikasi memiliki kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dikarenakan mampu bertahan di tengah kontraksi pada 2020.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap bidang akuntansi (Elisabeth, 2019). Ini juga didukung oleh penelitian Ardi (2013) yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi informasi mempengaruhi perkembangan sistem informasi akuntansi (SIA). Kemajuan Teknologi Informasi mempengaruhi perkembangan Sistem Informasi Akuntansi dalam hal pemrosesan data, pengendalian internal perusahaan, dan peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan dan sebagainya. Dengan adanya kemajuan yang telah dicapai dalam bidang akuntansi yang menyangkut Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan, maka sektor audit dalam hal ini pun dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut mengingat audit memiliki peranan penting didalam perekonomian baik sektor publik/negara maupun swasta. Dalam menyampaikan pidato kunci pada acara 2018 ASEAN Audit Regulators Group (AARG) Inspection Workshop dan the 8th AARG Meeting with The Audit Firms yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (31/07/2018), mantan

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) menyatakan bahwa dengan memastikan praktik audit dengan kualitas tertingginya mampu meningkatkan kepercayaan publik pada pelaporan keuangan yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya investasi.

Dalam upaya memenuhi kualitas audit yang terbaik, maka ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Hasil penelitian Muhayoca & Ariani (2017) yang berjudul “Pengaruh Teknik Audit Berbantuan Komputer, Kompetensi Auditor, Independensi, dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit” bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit secara signifikan ialah penerapan teknik audit berbantuan komputer. Hasil penelitian Qurba dan Ida Suraida (2020) yang berjudul “Pengaruh Penerapan E-Audit, Kompetensi, dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit” yang menyatakan bahwa E-Audit yang salah satu bentuknya ialah penerapan teknik audit berbantuan komputer memiliki pengaruh yang simultan terhadap kualitas audit.

Terlebih pada 2020 pandemi covid-19 telah memaksa setiap orang untuk melakukan penyesuaian kehidupan baru atau *New normal* serta mengikuti kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi

seperti *Work From Home*, *School From Home*, larangan mudik saat hari raya Idul Fitri dan hari besar keagamaan lain guna menghindari penularan virus corona menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para pelaku ekonomi. Tentu audit pun tak luput dalam menghadapi tantangan tersebut. Misalnya dalam pemerolehan bukti audit, yang seringkali terkendala kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dimana suatu wilayah harus melakukan peliburan karyawan, pembatasan shift, dan sebagainya berimbas pada pembatasan akses dan perjalanan maupun ketersediaan personel dari auditor dan auditee (Tanusdjaja, 2020).

Disinilah dibutuhkan teknologi ataupun sistem pembantu guna memudahkan proses audit mulai dari penerimaan perikatan audit, perencanaan proses audit, pelaksanaan pengujian audit, dan pelaporan audit yang dalam audit dikenal dengan istilah Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau *Computer Assisted Audit Techniques (CAAT)*. Penggunaan dan penerapan TABK diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas auditor dalam melakukan audit. Cukup banyak yang menumpukan dan mengandalkan komputer sebagai otak utama didalam proses tersebut dan berasumsi bahwa dengan diterapkannya TABK maka kinerja akan menjadi lebih baik. Namun jika kita mengambil prinsip konservatisme akuntansi yaitu sikap atau aliran (mazhab) dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan atau *outcome* yang terjelek dari ketidakpastian tersebut

(Suwardjono, 2010) maka penulis mencoba menerapkan prinsip konservatisme tersebut

Dalam laman DDTC *News* yang ditulis oleh Doni Agus Setiawan pada Rabu, 11 November 2020, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah merampungkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2020. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan sejumlah persoalan ketidakpatuhan yang menyebabkan kerugian negara. IHPS Semester I/2020 yang memuat ringkasan dari 680 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 634 (93%) LHP keuangan, 7 (1%) LHP kinerja, dan 39 (6%) LHP dengan tujuan tertentu. Lalu BPK pun melakukan pemeriksaan dan menemukan hasil sebanyak 7.868 temuan yang memuat 13.567 permasalahan sebesar Rp8,97 triliun. Dari total 13.567 temuan tersebut, sebanyak 6.713 temuan atau 50% adalah permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).

Dalam konteks pengawasan internal, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No.192 tahun 2014 menyatakan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disingkat BPKP merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pada laman resmi BPKP Republik Indonesia, pada tanggal 29 Mei 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Kementerian Sosial dan BPKP RI meluncurkan aplikasi Jaga. Dengan diluncurkannya aplikasi Jaga, diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan, ataupun ketidaktepatan program bansos. Di sisi lain, sesuai dengan laman berita di

Detiknews tanggal 12 September 2019 yang bertajuk "*Kemensos Sabet Penghargaan Pengelolaan Barang Milik Negara 2019*". Kementerian Sosial meraih Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level 3. Dimana maturitas SPIP level 3 (terdefinisi) yang bermakna Kementerian/Lembaga/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik.

Namun, apa yang terjadi di kemudian hari seakan bertolak belakang dengan apa yang diberitakan sebelumnya tersebut. Seperti yang ditulis dalam laman berita CNN Indonesia pada tanggal 6 Desember 2020 yang bertajuk "*KPK Tangkap Menteri Sosial Juliari Batubara*". Dalam laman berita tersebut tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah mengamankan uang sekitar 14,5 milyar yang terdiri dari pecahan rupiah, dollar Amerika Serikat, dan dollar Singapura. Selaku penerima, Juliari Peter Batubara dijerat pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHP. Padahal BPKP telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mencegah terjadinya hal tersebut

Seperti pada kasus korupsi Dana Desa Sebakung Jaya Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara misalnya. Ditulis dalam situs resmi BPKP RI pada 25 September 2021 BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah menyelenggarakan sosialisasi dan piloting implementasi aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES) kepada seluruh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) se-Kalimantan Timur. Dimana aplikasi SISWASKEUDES merupakan aplikasi pengawasan atas pengelolaan keuangan desa bagi APIP Kabupaten/Kota dengan pendekatan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dan Risk Based Audit. Namun, dalam laman berita Antaranews tanggal 26 Juli 2022 yang bertajuk “Kejaksanaan Negeri Penajam tahan satu Tersangka Dana Desa Sebakung Jaya” seakan menjadi antitesa dari apa yang dilakukan BPKP sebelumnya. Itulah mengapa perlunya kembali mengkaji terkait penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer dalam tubuh BPKP RI apakah memang sudah berjalan dengan baik atau belum.

Hasil penelitian Ebrahim M. Mansour (2016), Marei dan Takiah (2019), dan James Bierstaker, Diane Janvrin, D. Jordan Lowe, (2013) menemukan bahwa ekspektasi kinerja memiliki pengaruh paling signifikan terhadap penerapan teknik audit berbantuan komputer. Sedangkan dalam penelitian Shamsudi, Rajasharen, Maran, Ameer, dan Muthu (2015) justru yang paling berpengaruh signifikan ialah *Effort Expectancy* ataupun Ekspektasi Usaha bukan *Performance Expectancy* atau Ekspektasi Kinerja. Oleh karena itu, membuat penulis semakin bertanya apakah betul ekspektasi kinerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan teknik audit berbantuan komputer yang digadang-gadang merupakan teknik audit yang meminimalisir kesalahan.

Audit menurut Arens dan Loebbecke ialah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan

dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan proses audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Hasil penelitian Pramuditha dan Erinos (2020) dengan judul “Pengaruh Tekanan Ketaatan, Pengetahuan Audit, dan Pengalaman Audit terhadap Audit *Judgement*“ ditemukan hasil bahwa pengetahuan audit atau kompetensi dalam bidang audit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap audit *judgement*.

Sedangkan dalam penelitian Alamri dan Nangoi (2017) yang berjudul “Pengaruh Keahlian, Pengalaman, Kompleksitas Tugas, dan Independensi terhadap Audit *Judgement*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa justru keahlian auditor tidak memiliki pengaruh terhadap audit *judgement* dan yang berpengaruh justru kompleksitas tugas. Maka, penulis pun melihat bahwa *judgement* auditor yang merupakan *Research gap* tersebut yang semakin membuat penulis tertarik untuk meneliti.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Berdasarkan observasi awal berupa wawancara tidak berstruktur kepada lima auditor internal yang dilakukan penulis di kantor pusat BPKP RI terdapat *gap* atau kesenjangan yang menimbulkan permasalahan dalam penggunaan TABK. Kesenjangan (*gap*) permasalahan penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) auditor internal diantaranya: (a) Penggunaan TABK yang belum optimal, karena sebagian masih konvensional. (b) Masih adanya auditor



internal yang belum mahir menggunakan TABK. (c) Auditor internal masih ada yang belum memahami peran dan fungsi dari TABK. (d) Auditor internal masih belum kontinyu mengikuti pelatihan terkait TABK. (e) Faktor usia auditor internal menjadi kendala dalam penggunaan TABK.

Kesenjangan (*gap*) permasalahan kompetensi auditor diantaranya: (a) Kemampuan auditor yang kurang dalam menggunakan sistem yang terkomputerisasi. (b) Pengalaman kerja yang masih tergolong baru sebagai auditor internal. (c) Kurangnya pelatihan audit berbantuan computer dikalangan audit internal. (d) Masih ada beberapa auditor yang bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi khususnya Audit.

Kesenjangan (*gap*) permasalahan ekspektasi kinerja diantaranya: (a) Pekerjaan tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan. (b) Kurang efektif dalam penyelesaian pekerjaan. (c) Jauh dari harapan efisiensi waktu dan biaya. (d) Tanggung jawab auditor internal yang masih belum optimal. (e) Ekspektasi yang terlalu tinggi karena kurangnya pemahaman mereka tentang posisi auditor internal.

Kesenjangan (*gap*) permasalahan kompleksitas tugas diantaranya: (a) Jumlah informasi yang terlalu banyak terkait audit. (b) Birokrasi dengan instansi lain yang kompleks. (c) Data berbentuk *soft file* yang sangat mudah untuk dimanipulasi datanya oleh pihak-pihak tertentu. (d) Biaya investasi untuk sistem audit dan perawatan sistem yang sangat mahal. (e) Auditor sangat khawatir jika pada saat proses audit terjadi *error* pada sistem yang akan memungkinkan terjadinya kesalahan hasil audit.

Berdasarkan beberapa kesenjangan di atas, perlu adanya urgensi penelitian mengenai Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) yang dipengaruhi oleh kompetensi auditor, ekspektasi kinerja dan kompleksitas tugas. Urgensi dilakukannya penelitian tersebut, ditambah penelitian terhadap penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer yang masih jarang dilakukan oleh peneliti lain. Padahal TABK dijadikan sistem audit andalan lembaga/intansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan internal di kantor pusat BPKP RI.

Penelitian mengenai penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) yang dipengaruhi oleh kompetensi auditor, ekspektasi kinerja dan kompleksitas tugas masih sedikit, diharapkan menjadi kontribusi bagi penelitian selanjutnya. Sampel dan periode waktu yang digunakan. Sampel yang akan penulis ambil ialah auditor internal di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) selaku pengawas dan pemeriksa internal keuangan negara. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Audit, Ekspektasi Kinerja, dan Kompleksitas Tugas terhadap Penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) di BPKP RI”.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap penggunaan teknik audit berbantuan komputer?

2. Apakah terdapat pengaruh ekspektasi kinerja terhadap penggunaan teknik audit berbantuan komputer?
3. Apakah terdapat pengaruh kompleksitas tugas terhadap penggunaan teknik audit berbantuan komputer?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh kompetensi auditor terhadap penggunaan teknik audit berbantuan komputer.
2. Pengaruh ekspektasi kinerja terhadap penggunaan teknik audit berbantuan komputer.
3. Pengaruh kompleksitas tugas terhadap penggunaan teknik audit berbantuan komputer.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian di masa mendatang di bidang ilmu akuntansi dan sub bidang audit khususnya, terutama yang terkait dengan penggunaan teknik audit berbantuan komputer.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Auditor

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, ekspektasi kinerja, kompleksitas tugas dan penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Auditor di BPKP RI. Selain itu, Auditor mampu meningkatkan keterampilan yang lebih baik lagi dalam peningkatan kinerjanya.

### b. Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI)

Manfaat yang diharapkan bagi BPKP RI ialah dengan diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer, pembuat kebijakan didalam BPKP RI dapat mengefektifkan dan mengembangkan kembali Teknik Audit Berbantuan Komputer supaya semakin andal. Terlebih dengan tantangan zaman yang semakin tidak tertebak kedepannya seperti saat pandemik sekarang ini.